BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Indonesia saat ini menjadi sorotan, baik di mata masyarakat nasional maupun di mata dunia internasional. Masyarakat melihat dan meyakini sistem peradilan di negara kita sangat lemah. Saksi di Indonesia kurang mendapat perhatian dan perlindungan hukum, sehingga seorang saksi mudah dipengaruhi, diteror bahkan mungkin dibunuh agar tidak memberikan kesaksian untuk mengungkap suatu kejahatan. Setiap tindak pidana akan menimbulkan kerugian bagi perorangan, masyarakat, bangsa dan negara, termasuk masalah narkoba.¹

Masalah narkoba merupakan masalah nasional bahkan telah menjadi masalah internasional, karena narkoba telah mendatangkan bencana dimana-mana termasuk di negara kita Indonesia. Secara umum pengertian narkoba adalah sejenis zat yang bila digunakan (masuk di dalam tubuh) maka akan membawa pengaruh terhadap si pemakai dan pengaruh tersebut berupa merangsang, menimbulkan khayalan (halusinasi). Narkoba itu berasal dari kata Yunani narkonum yang berarti membuat lumpuh, membuat mati rasa²

Adapun yang dimaksud narkoba menurut undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba pasal 1 ayat (1) adalah "Narkoba adalah zat atau obat

¹ Surastini Fitriasih, 2022, **Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Adil**, hlm. 2.

² Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., 2003, **Tindak Pidana Narkoba**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi Sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.³

Peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.⁴

Peredaran narkotika di Indonesia merupakan salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum dan keamanan nasional. Tingginya angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika telah menimbulkan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun kesehatan masyarakat. Indonesia sebagai salah satu negara transit dan tujuan dalam perdagangan narkotika tingkat internasional. Di negara kita, masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, serta

³ Suhasril, 2005, **Tindak Pidana Narkotika**, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 89.

⁴ Soedjono D. , 1977, **Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia**, Bandung, Karya Nusantara, hlm. 5.

usaha untuk mengatasi penyalahguna Narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalagunaan Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.⁵

Dalam menghadapi situasi yang semakin kompleks dengan jaringan sindikat narkotika yang bersifat transnasional, perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi juga telah mempercepat penyebaran narkotika, sehingga mempersulit upaya penegakan hukum. Penanganan tindak pidana narkotika tidak hanya memerlukan langkah-langkah hukum yang tegas, tetapi juga strategi preventif dan kerjasama internasional untuk menghentikan arus peredaran narkotika ke dalam negeri. Dalam konteks ini, peran pelapor atau *whistleblower* sangat penting dalam mengungkap jaringan distribusi narkotika yang kompleks dan terselubung. Peran mereka memberikan informasi awal yang sering kali krusial dalam menangkap pelaku utama dan menghentikan operasi sindikat narkotika.

⁵Mahkamah Agung Republik Indonesia, **Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba**, <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika>, diakses pada 02 Oktober 2024 pukul 20.58 Wita.

Kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Peredaran obat terlarang narkoba masih tetap marak, bahkan akhir-akhir ini kejahatan penyalahguna narkoba semakin meningkat yang tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang-barang terlarang tersebut, belakangan ini telah dijadikan daerah tujuan operasi peredaran narkoba oleh jaringan penegdar narkoba internasional.⁶

Suatu tindak pidana apapun bentuknya akan menyebabkan kerugian bagi individu, masyarakat, bangsa, maupun negara, tidak terkecuali permasalahan narkoba. Masalah narkoba merupakan masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaan akan berdampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 1 nomor 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, bahwa "Penyalah guna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum". Narkoba sendiri sebenarnya obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediaannya perlu dijamin. Namun yang menjadi permasalahan kini adalah penyalahguna dari obat-obatan ini. Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut memberikan jaminan keamanan bagi orang-orang yang memberikan informasi valid tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta masyarakat mempunyai kesempatan yang

⁶ F Asya, 2009, **Narkoba dan Psicotropika**, Jakarta, Asa Mandiri, hlm. 3.

seluas-luasnya untuk berperan untuk membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahguna narkotika.

Persoalan mengenai narkotika semakin lama semakin meningkat, hal ini terbukti dengan adanya penyelundupan, perdagangan gelap, penangkapan, penahanan yang berhubungan dengan persoalan narkotika tersebut yang pernah dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri.⁷ Tanpa menghiraukan kehidupan jasmani dan rohani orang yang menjadi korban narkotika, para pedagang obat keras ini mengusahakan keuntungan yang sebesar-besarnya melalui perdagangan gelap atau dengan penyelundupan besar-besaran. Keuntungan yang sangat besar dari perdagangan ini menarik perhatian pedagang bahan narkotika.⁸

Peran *whistleblower* sangat besar untuk melindungi negara dari kerugian yang lebih parah dan pelanggaran hukum yang terjadi. Tetapi resiko yang mereka hadapi pun juga besar ketika mengungkap kejahatan, mulai dari ancaman terhadap keamanan sampai dikeluarkan dari instansi tempatnya bekerja, sehingga *whistleblower* penting untuk dilindungi. Dalam kasus tindak pidana narkotika, *whistleblower* dapat memberikan informasi kunci mengenai operasi sindikat narkotika, termasuk rute distribusi, pelaku, dan modus operandi yang digunakan. Informasi ini sangat penting bagi penegak hukum dalam merencanakan strategi penangkapan dan pemutusan jaringan narkotika. Namun,

⁷ Djoko Prakoso, Lany Bambang Riyadi, Amir Muhsin, 1987, **Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara**. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 165.

⁸ Wilson Nadeak, 1978, **Korban ganja dan masalah narkotika**. Bandung:Indonesia Publishing House, hlm. 90.

peran ini sering kali berisiko tinggi, mengingat jaringan narkoba yang bersifat transnasional dan memiliki kekuatan finansial yang besar. *Whistleblower* sering kali menjadi target intimidasi, ancaman, atau bahkan kekerasan fisik dari sindikat narkoba. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, *whistleblower* dapat merasa enggan atau takut untuk melaporkan informasi penting tersebut kepada pihak berwenang. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang kuat dan efektif menjadi salah satu kunci dalam mendorong lebih banyak individu untuk berani mengungkap kejahatan narkoba yang mereka ketahui.⁹

Masyarakat masih banyak yang takut untuk melapor ke kepolisian maupun BNN meskipun mengetahui ada orang di sekitar lingkungannya terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Sikap seperti ini tentunya sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Kehawatiran masyarakat dengan ancaman bahkan yang bisa membahayakan nyawa bila melaporkan adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba dijawab dengan tegas oleh undang-undang narkoba tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 100 Ayat (1) menyebutkan bahwa saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum dan hakim memeriksa perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dan keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan hartanya, baik sebelum selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Di Indonesia perlindungan hukum bagi *whistleblower* telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan namun implementasinya masih sering

⁹ Pemerintah Kota Balikpapan, 2019, ***Whistleblower***, <https://web.balikpapan.go.id/whistleblower>, diakses pada 02 Oktober 2024 pukul 21.11 Wita.

kali terbatas. Salah satu dasar hukum yang melindungi pelapor adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mencakup perlindungan bagi individu yang memberikan informasi terkait tindak pidana, termasuk narkoba. Namun, perlindungan yang diberikan sering kali tidak cukup kuat untuk menjamin keselamatan fisik, psikologis, dan sosial para *whistleblower*.

Dan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi pelapor tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam perkara tindak pidana tertentu, SEMA ini membahas kelemahan dan kekurangan hukum yang timbul ketika seorang pelaku tindak pidana tertentu bertindak sebagai saksi dan saksi pelaku yang bekerjasama untuk membongkar kelompok criminal. Beberapa peraturan di atas, di Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap *whistleblower*, seperti Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang sering dianggap melindungi *whistleblower*, hanya saja peraturan-peraturan tersebut tidak secara jelas mengatur mengenai apa dan bagaimana pengungkapan itu dapat dilakukan serta bagaimana cara dan mekanisme perlindungan terhadap *whistleblower*.¹⁰

Keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga penegak hukum sering kali memperlemah implementasi perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada *whistleblower*. Di samping itu, belum ada mekanisme yang jelas

¹⁰ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021, **Whistleblower**, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-artikel/16410/The-Power-of-Orang-Dalam-pada-Whistle-Blower-System.html>, diakses pada 07 Oktober 2024 pukul 16.19 Wita.

untuk memberikan perlindungan khusus bagi *whistleblower* dalam kasus-kasus narkoba yang melibatkan jaringan internasional, yang sering kali menimbulkan risiko yang lebih besar bagi keselamatan pelapor. Kelemahan-kelemahan ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penguatan kerangka perlindungan hukum bagi *whistleblower*, khususnya dalam kasus tindak pidana narkoba.¹¹

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh *whistleblower* dalam kasus tindak pidana narkoba adalah ancaman yang datang dari sindikat narkoba itu sendiri. Jaringan narkoba sering kali memiliki sumber daya yang besar dan mampu melakukan berbagai bentuk intimidasi, mulai dari ancaman verbal hingga kekerasan fisik. *Whistleblower*, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke perlindungan hukum yang memadai, sering kali menjadi sasaran kekerasan sebagai upaya untuk membungkam informasi yang mereka miliki.¹² Ancaman ini tidak hanya menyasar *whistleblower* secara individu, tetapi juga keluarganya, sehingga menambah tekanan psikologis dan meningkatkan risiko bagi mereka yang berani melapor. Selain itu, sindikat narkoba sering kali menggunakan pengaruhnya di berbagai level, termasuk institusi hukum, untuk menghalangi proses pelaporan. Tanpa perlindungan hukum yang efektif, banyak *whistleblower* akhirnya memilih untuk tidak melaporkan tindak pidana narkoba yang mereka ketahui. Kondisi ini menciptakan ketimpangan dalam upaya penegakan hukum, di

¹¹ Alif Fajar Herihanli Palimai, 2023, **Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Narkoba**, Makassar, hlm 5-6.

¹² Fathan Taris Milzam dan Sutrisno, 2023, **Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dalam Tindak Pidana Narkoba**, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Volume 3 Nomor 3, hlm. 2491.

mana informasi penting yang seharusnya dapat digunakan untuk memerangi sindikat narkoba terhenti di tangan individu yang takut akan keselamatannya.

Salah satu contoh mengenai penanganan kasus “peniup peluit” atau *whistleblower* Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Polres Badung, yaitu AAM (47) seorang dengan kewargaraan India yang saat itu melakukan liburan ke Bali, ditahan atas tuduhan terkait narkoba. Dia ditahan bersama 1,8 gram kokain. Peristiwa terungkap saat driver online tersebut awalnya mengira kotak kiriman tersebut akan diantarkan ke parkir, dekat dengan area diadakannya clubbing, namun driver online tersebut memutuskan untuk menyampaikan kecurigaannya pada polisi yang sedang melaksanakan tugasnya saat itu, pengemudi tersebut berhasil membatalkan pengiriman narkoba tersebut karena setelah membawa paket tersebut ke Posko Satgas Polsek Kuta Utara bersama anggota kepolisian untuk diperiksa isinya dan saat dilakukan pembongkaran paket ditemukan dalam paket terdapat 1 kotak kopi merk good day dan tiga bungkus klip plastik bening berisi serbuk putih yang berisi narkoba jenis kokain. Dan inisial AAM (47) berhasil ditangkap di Jalan Panatai Berawa No. 88, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, Bali.¹³

Salah satu isu utama adalah kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga penegak hukum dalam memberikan perlindungan yang holistik bagi *whistleblower*. Selain itu, prosedur administrasi yang berbelit-belit sering kali memperlambat proses pemberian perlindungan kepada *whistleblower* yang

¹³ Antara Bali, 2023, **Polres Badung selidiki dugaan warga India miliki kokain di Canggu**, <https://bali.antaranews.com/berita/309024/polres-badung-selidiki-dugaan-warga-india-miliki-kokain-di-canggu>, diakses pada 03 Oktober 2024 pukul 21.11 Wita.

membutuhkan bantuan dengan segera. Dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peran dan hak pelapor dapat menjadi hambatan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pemberantas kejahatan narkoba. Ketidaktahuan ini juga dapat disebabkan oleh kurangnya informasi yang tersedia secara luas dan pengetahuan masyarakat sekitar yang tidak merata. Oleh karena itu, masyarakat harus disosialisasikan dan diedukasi agar siapapun yang mengetahui dan melaporkan penyalahgunaan narkoba dapat ditindak. Untuk memberikan perlindungan hukum, melalui kepolisian, BNN dan LPSK. Melalui edukasi dan penyadaran masyarakat diharapkan masyarakat dapat mengurangi dan membantu jumlah peredaran narkoba di Indonesia.¹⁴

Perlindungan hukum *whistleblower* di Indonesia masih rentan dikarenakan seorang *whistleblower* yang berperan sebagai saksi pelapor berarti yang bersangkutan adalah pengungkap fakta yang melaporkan ini seringkali mendapat perlakuan tidak nyaman, individu yang melaporkan pelanggaran seringkali menghadapi risiko intimidasi, ancaman, bahkan sering kali menjadi target kriminalisasi. Adapun masalah mengenai perlindungan hukum bagi *Whistleblower* yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dan akhirnya masyarakat kurang aktif untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana narkoba, sehingga upaya penegakan hukum akan menjadi sulit oleh karena itu, perlu adanya upaya yang serius dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Pentingnya perlindungan hukum bagi seorang *whistleblower* ini dikarenakan mereka yang niatnya untuk berbuat kebaikan dengan mengungkap kejujuran dapat dituduh

¹⁴ Pebri Hansen Hutasoit at. all, 2023, **Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkoba** Volume 5 Nomor 1, hlm. 827 – 836.

melakukan tindak pidana seperti pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan, padahal sebenarnya mereka berperan sebagai pihak yang mengungkap kejahatan atau kecurangan. Amerika sendiri memiliki peraturan serta perlindungan khusus dalam melindungi seorang whistleblower agar tidak mengalami intimidasi serta ancaman-ancaman.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana skripsi yang berjudul " **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLEBLOWER* TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES BADUNG**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka muncul beberapa pertanyaan yang dapat dijadikan permasalahan dalam penelitian ini. Beberapa permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Kasus Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Badung?
2. Faktor-faktor Apakah yang Menghambat Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Kasus Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Badung?

¹⁵ Warna Bela Natasia at all, 2024, **Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower: Studi Perbandingan Indonesia-Amerika Serikat**, Jurnal Hukum Pendidikan dan Sosial Humaniora, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Volume 1 Nomor 4, hlm. 320-330.

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Agar penulis ini dapat lebih fokus terhadap topik yang dibahas dan tidak melebar, maka penulis membatasi pembahasan rumusan masalah dan penulis yakin dapat menulis secara sistematis dan komperitif. Penulis membatasinya pada Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Kasus Pidana Narkotika, serta Faktor-faktor Apakah yang Menghambat dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Kasus Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Badung.

1.4 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Kasus Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Badung.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor Apakah yang Menghambat Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Kasus Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Badung.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁶

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode yuridis empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologi. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.¹⁷

¹⁶ Zhinkmah Amritul, 2015, **Metode penelitian Hukum**, Jakarta, Indopres. hlm 18.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 21.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris difokuskan untuk mengetahui bagaimana bekerjanya hukum pada masyarakat. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan sosiologis yakni suatu pendekatan untuk mengamati bagaimana interaksi yang terjadi pada masyarakat pada saat norma hukum berjalan.
- b. Pendekatan fakta hukum yakni suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara berpegang teguh pada fakta – fakta yang didapatkan selama melaksanakan pengamatan dilapangan.¹⁸

1.5.3 Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari kata sumber, data dapat dibagi menjadi data lapangan dan data kepustakaan, menurut Soerjono Soekanto.¹⁹

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari tiga macam sumber yaitu :

1. Data Primer merupakan sumber data yang didapat dari lokasi penelitian yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari lokasi

¹⁸ Hendrojoyo, 2005, **Sosiologi Hukum pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum**, Cetakan 1, PT Dieta Persada, Surabaya, hlm, 4.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, **Penelitian Hukum Normatif**, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15.

penelitian yaitu di Wilayah Hukum Polres Badung di Satuan Reserse Narkoba Polres Badung yang berupa hasil wawancara secara lisan maupun tertulis.

2. Data sekunder merupakan sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.²⁰ Data sekunder diperlukan untuk melengkapi data primer yang didapat pada lokasi penelitian. Data sekunder biasa didapat melalui buku-buku, jurnal, catatan, peraturan perundang-undangan, serta bukti yang telah ada seperti arsip baik yang telah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum yang berkaitan dengan penelitian.
3. Data tersier merupakan sumber yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang terjadi dari jurnal-jurnal, surat kabar, majalah, kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan lain sebagainya.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu Teknik untuk mendapatkan informasi dengan cara melakukan diskusi dengan narasumber. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung

²⁰ Zainuddin Ali, 2014, **Metodologi penelitian hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

kepada narasumber menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun, jelas dan terarah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang di tulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan mengenai kasus yang diteliti.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan semua terkumpul, maka data tersebut akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Sementara itu penyajiannya dilakukan secara deskriptif Analisa yaitu suatu cara Analisa data yang dilakukan dengan jelas, menyusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang ilmiah.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang diterapkan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup , dan metodologi penelitian

serta sistematika penelitian yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan secara menyeluruh.

BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLEBLOWER* KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES BADUNG

Dalam bab kajian teoritis disini menjelaskan teori tentang teori perlindungan hukum, teori efektivitas hukum, pengertian perlindungan hukum, konsep *whistleblower*, pengertian *whistleblower*, pengatur hukum *whistleblower*, pengertian tindak pidana narkotika, jenis tindak pidana narkotika, sanksi pelaku tindak pidana narkotika, Profil Polres Badung.

BAB III TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLEBLOWER* KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES BADUNG

Menguraikan dan menjelaskan hasil mengenai Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Kasus Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Badung.

BAB IV PEMBAHASAN FATOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLEBLOWER* KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES BADUNG

Menguraikan dan menjelaskan mengenai Faktor-faktor Apakah yang Menghambat dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap

Whistleblower Kasus Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres
Badung.

BAB V PENUTUP

Dalam bab akhir akan menjelaskan mengenai simpulan berdasarkan hasil pembahasan yang telah di uraikan sebelumnya serta saran-saran yang dapat diberikan.